

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PSAK No 1 Tahun 2013, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Sehingga laporan keuangan ini menjadi wujud pertanggungjawaban manajemen dalam menggambarkan aktivitas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No 1, 2013). Maka Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus tranparan dan akuntabel agar keputusan dibuat oleh pihak internal dan eksternal bisa tepat.

Penman dan Zhang (2002) serta Wolk dan Tearney (2000) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak saja berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, tetapi juga estimasi yang seringkali diterapkan berkaitan dengan akuntansi akrual. Sehingga kebijakan akuntansi dan sebagainya sering dijadikan alat untuk manipulasi data oleh manajemen perusahaan sehingga merugikan pihak-pihak eksternal.

Banyak Kasus di Indonesia seperti PT Kimia Farma Tbk (2001) dengan *overstate* laba, PT Lippo Bank Tbk, (2002) dengan penggantian laporan keuangan, PT Sari Husada Tbk (2005) terkait kasus perdagangan

kembali (*treasury stock*), PT Kereta Api Indonesia Tbk (2005) dengan penggandaan laporan keuangan, dan PT Pakuwon Jati Tbk, (2011) yang mana memanipulasi nilai asset tetap, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya informasi yang berkualitas dan bermanfaat.

Penerapan prinsip konservatisme oleh perusahaan dapat mencegah manipulasi keuangan yang dilakukan oleh manajer karena prinsip ini dapat mencegah pelaporan laba yang *overstatement* (Briliant, 2013). Sebagai contoh *overstatement* laba, pada laporan keuangan Toshiba Corp yang melebih-lebihkan keuntungan sebesar 151,8 Miliar Yen (US\$ 1,2 Miliar) antara tahun 2008 hingga 2014, Hisao Tanaka (CEO dan Presiden) dan Norio Sasaki (mantan CEO) menyadari laporan laba palsu ini, dan merancang agar laporan ini sulit diketahui oleh auditor. (www.JagatReview.com/2015/7). Oleh sebab itu, dampak dari kebijakan manajemen untuk melakukan *overstate* laba perusahaan akan membuat sinyal yang buruk untuk para pengguna laporan keuangan karena bisa saja akan menutupi sinyal tanda-tanda terkait dengan keberlanjutan perusahaan atau *going concern* perusahaan.

Konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai suatu prinsip kehati-hatian yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, memperlambat pengakuan pendapatan dan untung, merendahkan penilaian aset dan meninggikan penilaian kewajiban (Lo, 2005). Dengan adanya konservatisme akan mencerminkan laba yang minimum saja beda dengan halnya manajemen laba yang mencerminkan keadaan laba yang tidak

hanya minimum tetapi maximum agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen terlihat lebih baik hal ini dapat mencegah dalam manajemen laba yang akan terjadi.

Perdebatan konservatisme akuntansi masih sering terjadi. Berdasarkan Kerangka Konseptual *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk Pelaporan Keuangan, konsep konservatisme akuntansi sudah bukan lagi merupakan karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual yang baru dikarenakan tidak sesuai dengan kerangka teori IFRS dimana laporan keuangan berdasarkan IFRS harus bersifat dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan sebanding, tetapi tanpa bias konservatif. Namun dalam penerapan aturan IFRS tertentu, prinsip akuntansi konservatif masih dipertahankan pada berbagai area meskipun dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menyiratkan bahwa prinsip konservatisme tidak lagi diterapkan (Hellman, 2007).

Menurut Hikmah (2013), konsep konservatisme akuntansi tidak lagi digunakan sejak tahun 2010, penggantinya adalah konsep *prudence* yang menggunakan *current value* sebagai indikator pengukuran laporan keuangan yang dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan sebanding. Terdapat perbedaan antara konservatisme (*conservatism*) dengan *prudence*. Dalam konsep *conservatism*, laba dan pendapatan akan diakui jika benar-benar telah terealisasi, tetapi jika rugi akan segera diakui (Pesimistik). Sementara itu, dalam konsep *prudence* ketika terjadi laba dan pendapatan atau menurunnya kewajiban dan beban, walaupun belum

teralisasi tetapi akan diakui jika memang kriteria dalam pengakuan tersebut sudah terpenuhi (Optimistik) (Brilianti, 2013).

Aturan tersebut di Indonesia belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh, hal tersebut dapat dilihat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana masih terdapat beberapa metode akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 mengenai persediaan dan pilihan dalam menghitung biaya persediaan, PSAK No. 16 mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutannya, PSAK No. 19 mengenai aset tidak berwujud dan pilihan dalam menghitung amortisasinya dan PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Pilihan metode akuntansi yang terdapat dalam SAK akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung prinsip konservatisme ini mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut (Sari dan Adhariani, 2009).

Menurut Wardhani (2008), konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dalam tingkatan yang berbeda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari implementasi *good corporate governance*. Implementasi dari

corporate governance dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu dari kebijakan ini terkait dengan prinsip konservatisme yang digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh proporsi komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi yang telah dilakukan antara lain oleh Wulandini *et al.*, (2012), Limantauw (2014), Pramana (2010) dan juga Yustina (2013), menunjukkan hasil proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sementara penelitian Wardhani (2008), Pratanda dan Kusmuriyanto (2014), dan Baharudin *et al.*, (2011) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi juga telah dilakukan oleh Yustina (2013), membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan penelitian Wulandini *et al.* (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi yang telah dilakukan oleh Yustina (2013), Oktomegah (2012), membuktikan bahwa kepemilikan manajerial

tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Namun demikian hasil penelitian Wardhani (2008) memperlihatkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Dewi dan Suryanawa (2014), serta Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh kepemilikan publik terhadap konservatisme akuntansi yang telah dilakukan oleh, Deviyanti (2012), menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara penelitian Alfian (2013), Sari, *et al.* (2014) memperlihatkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh rapat dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi yang telah dilakukan oleh setiawati (2015), memperlihatkan hasil rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan Khairudin (2014), frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian terdahulu tentang pengaruh rapat komite audit terhadap konservatisme akuntansi yang telah dilakukan oleh Munif dan Achmad (2013), menunjukkan hasil rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan dalam penelitian Wulandini *et al.* (2012), rapat komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian diatas dimana terjadi perbedaan hasil dari

tiap-tiap variabel maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Tekstil dan Garment Yang Terdaftar di BEI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- A. Banyak Kasus di Indonesia seperti PT Kimia Farma Tbk, 2001 dengan *overstate* laba, PT Lippo Bank Tbk, (2002) dengan penggantian laporan keuangan, PT Sari Husada Tbk (2005) terkait kasus perdagangan kembali (*treasury stock*), PT Kereta Api Indonesia Tbk (2005), dengan penggantian laporan keuangan, dan PT Pakuwon Jati Tbk, (2011) yang menunjukkan bahwa perlunya informasi yang berkualitas dan bermanfaat.
- B. Permasalahan yang terjadi seputar penggunaan prinsip konservatisme ini dikarenakan ada yang mengatakan bahwa prinsip ini bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, misalnya untuk menghindari perilaku oportunistik manajemen dengan melakukan manajemen laba. Pihak yang lain mengatakan bahwa prinsip ini tidak bermanfaat karena hanya akan menjadi kendala dalam melaporkan keuangan karena tidak tercapainya pengungkapan secara penuh
- C. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen

manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan prinsip *corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

1.3 Batasan Masalah

Perusahaan yang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pada tahun 2010-2015. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, rapat dewan komisaris dan rapat komite audit. Dan variabel dependennya adalah konservatisme akuntansi

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diutarakan oleh peneliti maka dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah

- A. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi?
- B. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi?
- C. Apakah Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi?
- D. Apakah Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap

Konservatisme Akuntansi?

E. Apakah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi?

F. Apakah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi?

1.5 Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, rapat dewan komisaris dan rapat komite audit secara simultan dan parsial terhadap penerapan konservatisme akuntansi.

1.6 Manfaat Masalah

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Akuntansi, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap *corporate governance* dan konservatisme akuntansi.

B. Manfaat Secara Praktisi

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk para *stakeholder*.